



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran No. Tlp: (024) 6921053 / 6921055
Website : <http://setwan.semarangkab.go.id> E-mail : , 50512

Ungaran, 24 Agustus 2026

Nomor : 170/ 912 / 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi DPRD

Yth. BUPATI SEMARANG

Di-

UNGARAN

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 serta Menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Agustus 2026 dengan agenda Persetujuan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Semarang Tahun 2026, bersama ini kami memberikan rekomendasi kepada Saudara sebagai berikut:

1. Terkait bantuan hibah keagamaan, Badan Kesbangpol agar:
 - a. menyusun kriteria dan besaran hibah bantuan keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. berkoordinasi dengan FKUB Kabupaten Semarang untuk menggali informasi dan melakukan verifikasi terhadap usulan hibah bantuan keuangan, sehingga pemberian hibah dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Peringkat SAKIP Pemerintah Kabupaten Semarang di Tahun 2025 pada posisi 33 dari 35 Kab/Kota yang ada di Jawa Tengah, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Semarang selaku koordinator SAKIP agar:
 - a. Bersama Tim SAKIP Kabupaten Semarang dan seluruh Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Semarang;

- b. Mendorong/mensupport pelaksanaan Dialog Karya/Kinerja agar terbangun pada Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) tingkat Pemerintah Daerah secara berkala sebagai media monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan percepatan pemenuhan target nilai SAKIP tahun 2028 agar mencapai peringkat 15 di Jawa Tengah;
4. Penyaluran bantuan bagi anak yatim dan korban bencana tidak perlu dilaksanakan secara seremonial di tempat umum agar lebih tepat sasaran, menjaga privasi dan emosional psikologis anak, serta untuk memberikan perlindungan sosial bagi anak dan korban;
5. Mengingat fungsi E-KTP sebagai penyimpan data pribadi, Dukcapil agar melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam penggunaannya. Mengingat hal tersebut berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;
6. Inspektorat dalam penanganan kasus aduan dari masyarakat agar segera diselesaikan terutama pengawasan terkait Keuangan Desa maupun BUMDES;
7. Satpol PP agar:
 - a. mengatur dan menugaskan personilnya di setiap Kecamatan dalam rangka deteksi dini dan cegah dini Trantibum Linmas;
 - b. melaksanakan Patroli di wilayah Perbatasan Kabupaten Semarang;
 - c. berkoordinasi dengan OPD lain yang mempunyai giat Sosialisasi Narkoba;
8. Camat sebagai pejabat pemangku wilayah Kecamatan, agar:
 - a. turut mencermati dan mengkomunikasikan pada Kepala Desa/Lurah terkait kesesuaian data pada data penerima bantuan keuangan bagi masyarakat;
 - b. berkolaborasi ke bawah, turut mengawal dan memastikan progres pelaksanaan program Pokir;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperhatikan tata kelola ruangan dan kebersihan kantor;
9. Dari total lahan sawah Kabupaten Semarang seluas 19.520,31 Ha terdapat 6.740 Ha lahan tadah hujan rawan, oleh karena itu Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan agar segera mengusulkan pembangunan embung mikro, sumur resapan, atau pompa air portabel, serta pendampingan pola tanam adaptif musim;

10. Seiring meningkatnya serangan hama tikus, perlu didorong pemasangan Rumah Burung Hantu (rubuha) sebagai predator alami, gropyokan Tikus secara terjadwal bersama kelompok tani, serta penggunaan pestisida Tikus secara selektif dan terkoordinasi;
11. Mengingat penggunaan pupuk kimia sejak awal tahun 1990-an mengakibatkan degradasi kesuburan tanah, maka perlu diberikan bantuan pupuk organik bagi petani di lahan kritis, dengan mengusulkan alokasi melalui APBD Perubahan atau APBD mendatang serta difasilitasi oleh penyuluh lapangan;
12. Untuk mengantisipasi turunnya produksi Pertanian, Pemerintah Daerah perlu memperjuangkan ketersediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, pestisida nabati, serta modernisasi alsintan yang tepat sasaran dan waktu, dengan menjadikannya prioritas dalam rancangan Anggaran serta melibatkan Mitra Tani dan Penyuluh dalam perencanaan partisipatif;
13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan agar menertibkan data pedagang beserta kepemilikan kartu identitas dan kios pasar, mengingat masih ditemukannya praktik jual beli kios serta ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga perlu segera dilakukan pendataan ulang secara menyeluruh guna memperoleh data pedagang yang valid, akurat, dan tertib administrasi;
14. Pemerintah Kabupaten Semarang agar membedakan perlakuan pemungutan pajak dan retribusi antara pengusaha besar dengan pelaku UMKM dan Perlu adanya klasifikasi Wajib Pajak yang jelas serta kebijakan yang berpihak pada UMKM tanpa mengorbankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan;
15. BKUD agar menginventarisir data penggunaan air bawah tanah di wilayah Kecamatan Tengaran menjadi potensi pendapatan dari Pajak ABT;
16. Pemda agar bisa menganggarkan untuk mengawali pembangunan IPAL di TPA Blondo;
17. Target pendapatan pada Dinas Perhubungan agar dapat ditambahkan, karena adanya tambahan retribusi kios di depan Pasar Projo Ambarawa yang akan dijadikan terminal pangkalan angkutan;
18. Dinas Perhubungan agar tidak mengajukan permohonan keringanan retribusi kios terminal kepada Bupati;

19. Pemda agar menganggarkan perbaikan terminal Palbapang Bandungan mengingat terminal tersebut sebagai ikon wisata Kabupaten Semarang yang kini kondisinya rusak parah, serta menertibkan pedagang liar sehingga dapat menempati kios kios yang masih kosong;
20. DPU agar merumuskan kamus pokir sesuai dengan data jalan dengan kondisi rusak, yang dapat diusulkan perbaikan;
21. Bapperida untuk dapat menyusun Kamus Pokir lebih awal dari sekarang, supaya dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah;
22. Belanja operasi di OPD yang rata-rata belum terserap sesuai dengan rencana, agar dapat segera direalisasikan;
23. Bupati agar mendorong Perangkat Daerah terkait untuk meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak dari kategori Pratama menjadi kategori Madya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian Saudara, disampaikan terimakasih.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Arsip.